

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Provinsi Riau Pekanbaru

PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) Provinsi Riau Pekanbaru adalah Lembaga Keuangan Non Bank milik Pemerintah Provinsi Riau (BUMD) yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau No. 19 Tahun 2002 tanggal 27 Desember 2002, Akta Notaris Tito Utoyo, SH No. 105 tanggal 19 Juni 2003 yang sudah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Akta Notaris No. 79 tanggal 27 Juni 2010. Perusahaan didirikan berbentuk Badan Hukum di bawah nama PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Provinsi Riau Pekanbaru berkedudukan dan berkantor pusat di Pekanbaru, yang disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No. C-12248.HT.01.01 TH. 2003, tertanggal 25 Februari 2004, dan ditetapkan kembali dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No. AHU.15608.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 31 Maret 2008.

Pembentukan PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Provinsi Riau Pekanbaru merupakan perwujudan komitmen politik dan suatu kebijakan daerah yang bertitik tolak dari kondisi sosial ekonomi nasional umumnya dan Riau khususnya, sekaligus sebagai terobosan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Provinsi Riau yang merupakan salah satu upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.

Selain itu, pembentukan PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Provinsi Riau Pekanbaru juga dilatarbelakangi oleh pengalaman yang cukup panjang dari upaya-upaya pemerintah dalam memberdayakan UMKM melalui proyek-proyek pemberdayaan masyarakat dengan pola hibah, *grant*, dan dana bergulir. Pemberdayaan UMKM melalui proyek-proyek tersebut boleh dikatakan tidak diperlihatkan hasilnya, bahkan telah membentuk sikap mental masyarakat “*menunggu kapan lagi datangnya bantuan pemerintah*”. Program dana bergulir pengembaliannya macet total, hanya sekitar 10% yang dapat dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.

Kondisi demikian menyebabkan Pemerintah Provinsi Riau mencari bentuk, pola, system dan prosedur pengelolaan dana kepada UMKM yang dapat dilakukan secara terus menerus, tidak terikat kepada tahun anggaran pemerintah, tidak dilakukan tergesa-gesa serta melalui analisis yang komprehensif, sehingga tepat guna dan tepat sasaran. Agar maksud tersebut terwujud, maka pengelolaan dana tersebut harus dilakukan oleh suatu institusi/lembaga yang bersifat otonom dan berbadan hukum sendiri yang bertugaskhusus memberdayakan UMKM.

Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah Provinsi Riau mempersiapkan pembentukan suatu institusi dalam bentuk Lembaga Keuangan Bukan Bank Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk Perseroan Terbatas. Pada tahun 2002 Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah No. 19 tahun 2002 membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PT PER)

Provinsi Riau Pekanbaru yang pada hakekatnya dimaksudkan untuk mengatasi masalah permodalan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), bahkan juga koperasi dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan ekonomi rakyat Riau secara profesional sebagai salah satu upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.

Maksud dan tujuan perusahaan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah umumnya dan Pemerintah Provinsi Riau khususnya dalam membina, mengembangkan dan memberdayakan ekonomi rakyat, khususnya di bidang pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM) serta Lembaga Keuangan Mikro dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan permodalan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) serta Lembaga Keuangan Mikro
- b. Melakukan kegiatan pendidikan dan latihan manajemen usaha.
- c. Pengelolaan dana-dana pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) baik yang berasal dari pemerintah maupun swasta.
- d. Pelaksanaan program redistribusi aset produktif Provinsi Riau.
- e. Kegiatan usaha lainnya guna menunjang pelaksanaan kegiatan di atas.

Visi dan Misi PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Provinsi Riau Pekanbaru

PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Provinsi Riau Pekanbaru mempunyai visi dan misi perusahaan sebagai berikut :

1. Visi

Terwujudnya PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Provinsi Riau Pekanbaru sebagai mitra usaha terpercaya dalam mengembangkan ekonomi rakyat Riau di Provinsi Riau.

2. Misi

- a. Menyalurkan pinjaman untuk modal usaha UMKM.
- b. Membina manajemen usaha UMKM melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- c. Melakukan Bina Mitra Usaha dalam memajukan ekonomi rakyat.
- d. Melaksanakan kerjasama dalam rangka redistribusi asset.

Bisnis plan yang direncanakan oleh PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Provinsi Riau Pekanbaru pada tahun 2014 adalah :

1. Memperluas jangkauan pelayanan pinjaman di seluruh Kabupaten dan daerah yang potensial di wilayah Provinsi Riau. Untuk tahun 2014 direncanakan penyaluran pinjaman sebesar Rp 107,8 milyar.
2. Membuat produk-produk pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Riau.
3. Meningkatkan penyaluran pinjaman tanpa agunan.
4. Menambah bidang usaha permodalan berdasarkan syariah.

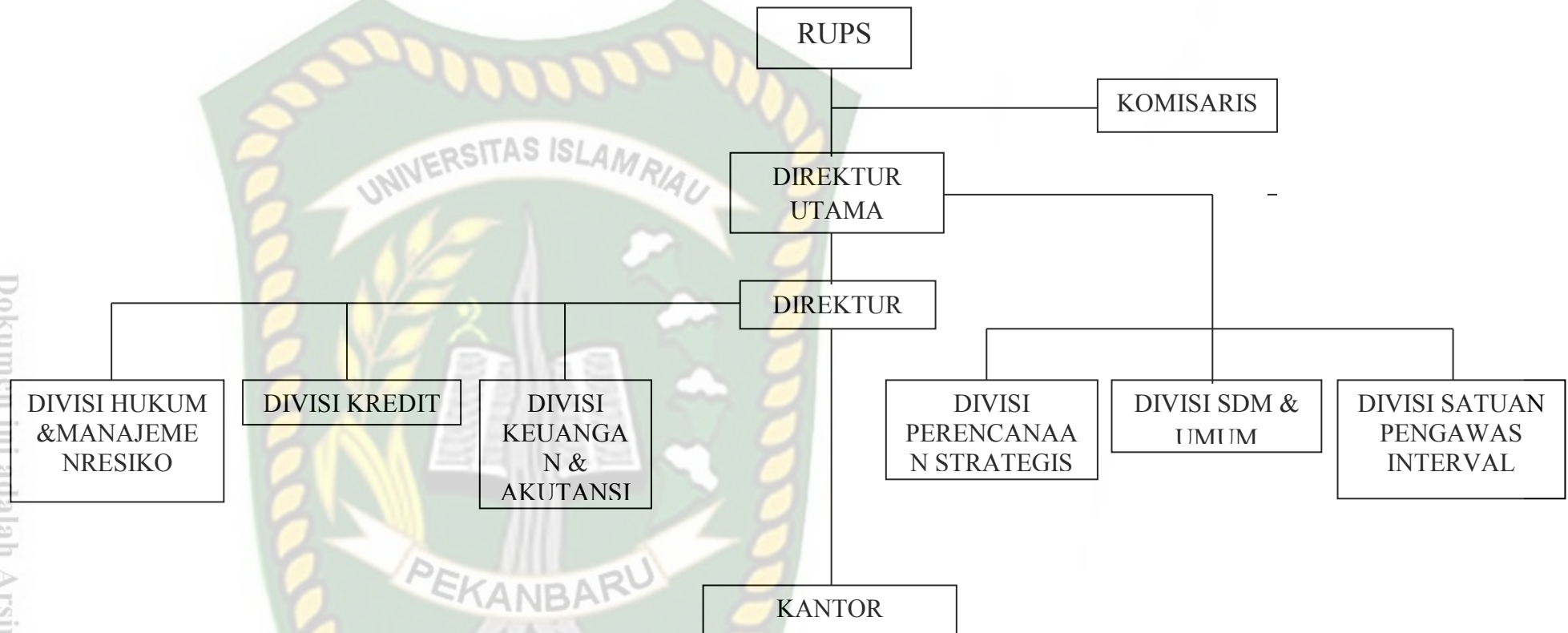
4.2 Struktur Organisasi PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Provinsi Pekanbaru

Struktur organisasi merupakan salah satu dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap anggota organisasi pada setiap pekerjaan. Sehingga struktur organisasi dibuat secara sederhana, efektif untuk dapat bekerja secara efisien. Selain itu struktur organisasi sering disebut bagan atau skema organisasi dengan ini gambar skematis tentang hubungan pekerjaan antara orang yang terdapat dalam suatu badan untuk mencapai tujuan.

Struktur organisasi PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Provinsi Riau Pekanbaru sama seperti struktur organisasi yang lain yaitu menggunakan garis yang menerangkan kedudukan yang paling tinggi hingga yang paling rendah jabatannya dan struktur organisasi pada PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Provinsi Riau Pekanbaru juga merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan dan saling berinteraksi. Struktur organisasi PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Provinsi Riau Pekanbaru dapat dilihat pada gambar 4.1:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Pekanbaru



Divisi risiko

Tugas dan tanggung jawab:

Divisi Manajemen Risiko menyampaikan Laporan Evaluasi Risiko kepada Direksi secara periodik, yaitu harian, mingguan dan bulanan serta menyampaikan beberapa jenis laporan lainnya kepada Dewan Komisaris serta kepada pihak eksternal terkait, seperti Bank Indonesia.

Komitmen perusahaan terhadap penerapan Manajemen Risiko antara lain :

1. Mendeteksi/mengidentifikasi risiko sedini mungkin pada setiap aktivitas terkait dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab.
2. Melakukan pengukuran risiko dengan memperhitungkan besarnya dampak dan kemungkinan terjadinya peluang risiko.
3. Melakukan evaluasi sumber dan penyebab terjadinya risiko, sebagai dasar untuk memetakan dan mengendalikan risiko yang signifikan.
4. Mengelola strategi pengendalian secara berkesinambungan terhadap risiko yang mempunyai prioritas tinggi/risiko signifikan demi kelangsungan hidup perusahaan.
5. Melakukan pemantauan risiko secara terus menerus, khususnya yang mempunyai dampak cukup signifikan terhadap kondisi perusahaan.
6. Melaporkan hasil identifikasi, pemantauan dan tindak lanjut pengendalian risiko secara periodik setiap triwulan, semester dan tahunan.
7. Menjadikan pengelolaan risiko sebagai dasar pemeriksaan (audit berbasis risiko) dan sebagai Key Performance Indicator (KPI) bagi setiap Pimpinan Unit Kerja.

Divisi kredit

Tugas dan tanggung jawab:

Bagian kredit merupakan aparat manajemen yang ditugaskan membantu direksi dalam menangani masalah-masalah khusus, yaitu bidang pembiayaan. Tugas dan tanggung jawab bagian kredit antara lain :

- a. Membuat usulan rancangan pemasaran kepada direksi.
- b. Memantau secara terus menerus efektifitas dan kolektifitas pembiayaan.
- c. Melaksanakan supervisi program pembiayaan dan pemasaran.
- d. Memonitor lalu lintas jatuh tempo deposito dan tabungan besar, serta mengadakan pendekatan ulang dan mengoptimalkan jaringan atau hubungan dengan nasabah.
- e. Bertanggungjawab terhadap kolektibilitas nasabah yang dipromosikan dan atau dibawah pembinaannya sebagai senior Account Officer.
- f. Melakukan monitoring, evaluasi, review terhadap kualitas portofoliopembiayaan yang diberikan. Dalam rangka pengamanan terhadap pembiayaan pada unit yang ada dibawah supervisinya.
- g. Melaksanakan koordinasi terhadap setiap pelaksanaan tugas-tugas pemasaran dan pembiayaan dari unit yang ada dibawah supervisinya sehingga dapat memberikan pelayanan kebutuhan perbankan kepada nasabah secara efektif dan efisien.
- h. Melakukan monitoring, evaluasi, review dan supervisi terhadap setiap pelaksanaan tugas dari fungsi pemasaran dan pembiayaan dalam rangka pengamanan terhadap pembiayaan yang diberikan.

- i. Menyusun strategi, planning dan melakukan pemasaran atau solidaritas nasabah baik dalam rangka keuntungan sumber dana maupun alokasi pembiayaan secara efektif dan efisien serta terarah, baik melalui database maupun jaringan nasabah.

Divisi keuangan dan akuntansi

Tugas dan tanggung jawab:

Sebagai jabatan penting dalam perusahaan, seorang manajer harus mengetahui semua hal yang berkaitan dengan keuangan. Karena manajer keuangan tidak jauh dari analisis keuangan, perencanaan keuangan sampai keputusan investasi.

Berikut ini tugas divisi keuangan dan akuntansi :

1. Divisi Keuangan dan akuntansi bekerja sama dengan manajer lain, bertugas merencanakan dan meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan
2. Divisi Keuangan dan akuntansi bertugas mengambil keputusan penting investasi dan berbagai pembiayaan serta semua hal yang terkait dengan keputusan tersebut
3. Divisi Keuangan dan akuntansi bertugas dalam menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan seefisien mungkin dengan menjalin kerja sama dengan manajer lainnya
4. Divisi Keuangan dan akuntansi bertugas sebagai penghubung antara perusahaan dengan pasar keuangan sehingga bisa mendapatkan dana dan memperdagangkan surat berharga perusahaan

Secara ringkas dari empat tugas utama divisi keuangan dan akuntansi di atas dapat kita simpulkan bahwa tugas utama divisi keuangan dan akuntansi berhubungan dengan keputusan investasi dan pembiayaan perusahaan yang berpengaruh terhadap laju pertumbuhan perusahaan.

Berikut ini tanggung jawab seorang divisi keuangan dan akuntansi:

1. Mengambil keputusan yang berkaitan dengan investasi
2. Mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembelanjaan
3. Mengambil keputusan yang berkaitan dengan deviden
4. Merencanakan, mengatur dan mengontrol perencanaan, laporan dan pembiayaan perusahaan.
5. Merencanakan, mengatur dan mengontrol arus kas perusahaan
6. Merencanakan, mengatur dan mengontrol anggaran perusahaan
7. Merencanakan, mengatur dan mengontrol pengembangan sistem dan prosedur keuangan perusahaan
8. Merencanakan, mengatur dan mengontrol analisis keuangan
9. Merencanakan, mengatur dan mengontrol untuk memaksimalkan nilai perusahaan

Divisi perencanaan strategis

Tugas dan tanggung jawab:

Perusahaan-perusahaan korporasi atau perusahaan yang mempunyai beberapa divisi perlu menetapkan perencanaan strategis yang handal, agar perusahaan

tersebut dapat survive dari berbagai kondisi perekonomian yang ada. Adapun kegiatan perencanaan ini terdiri dari 4 kegiatan, yakni:

1. Menetapkan misi perusahaan, adalah merupakan suatu penetapan rencana tentang tujuan dan sasaran dari perusahaan itu. Misi ini dibuat dan direvisi secara berkala disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan pasar sehingga akan memicu para manager dan bawahannya untuk tetap memfokuskan pada misi tersebut.
2. Menetapkan unit usaha strategis (*Strategic Business Unit – SBU*), semakin berkembang dan membesarnya perusahaan maka membentuk unit usaha yang startegis mutlak diperlukan. Hal ini menjaga dan membantu core business yang utama tetap berjalan. Dan setiap SBU memiliki 3 karakteristik, yaitu: (a) merupakan kelompok usaha terkait yang terpisah dari bagian usaha; (b) memiliki kolompok persaing tersendiri; (c) memiliki manager yang bertanggung jawab dalam perencanaan strategis dan kinerja laba serta pengendaliannya.
3. Mengalokasikan sumber daya untuk tiap SBU, yang dimaksud sumber daya adalah sumber dana, SDM, dan perangkat yang berkaitan dengan SBU tersebut, sehingga SBU tersebut dapat survive dan memberikan kontribusi bagi korporasi usaha.
4. Merencanakan usaha baru, dimana terdapat tiga pilihan diantaranya adalah pertama, dengan mengidentifikasi peluang yang tumbuh dalam bisnis perusahaan saat ini (peluang pertumbuhan intensif), kedua, dengan mengidentifikasi peluang untuk membangun atau memperoleh bisnis yang

berkaitan dengan bisnis perusahaan saat ini (peluang pertumbuhan integratif), ketiga, dengan mengidentifikasi peluang untuk menambah bisnis menarik yang tidak ada kaitannya dengan bisnis perusahaan saat ini (peluang pertumbuhan diversifikasi).

Divisi SDM dan umum

Tugas dan tanggung jawab:

1. Perumusan rencana, kebijakan dan strategi SDM sesuai dengan arah strategis bisnis perusahaan dan UU.
2. Analisis dan evaluasi dalam rangka menentukan tingkat kebutuhan optimal SDM baik dalam jumlah maupun kualitas.
3. Perumusan kebijakan serta metoda pengembangan kompetensi SDM perusahaan dalam memenuhi kebutuhan perusahaan jangka pendek maupun panjang.
4. Perumusan kerangka dasar program kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka memenuhi kebutuhan perusahaan dan pengembangan karir
5. Pengembangan sistem kompensasi termasuk remunerasi dan manfaat yang berorientasi kepada prestasi dan kontribusi.
6. Perumusan prosedur pengelolaan SDM antara lain meliputi penerimaan karyawan, penempatan, pengangkatan, orientasi, penilaian, pengembangan karir, hubungan karyawan, mutasi, penugasan diluar perusahaan, tenaga outsourcing baik langsung maupun pihak ketiga.
7. Pengelolaan database dan informasi karyawan.

8. Pengelolaan kegiatan Hubungan Industrial Perusahaan, yang meliputi penyelesaian Isu-Isu ketenagakerjaan, evaluasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan peraturan pelaksanaan (SKD) dari PKB dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan.
9. Pencapaian kinerja di unit kerjanya
10. Penyusunan laporan unit kerja.
11. Penyusunan RKA, POA, dan evaluasi SOP unit kerja.
12. Penyelesaian tindak lanjut temuan audit internal maupun eksternal di lingkungan unit kerjanya.
13. Pembinaan dan peningkatan mutu karyawan di lingkungan unit kerjanya.

Divisi satuan pengawasan internal

Tugas dan tanggung jawab:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan.
2. Memastikan atau mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko pada unit terkait sesuai dengan kebijakan perusahaan.
3. Melakukan evaluasi dan validasi terhadap sistem yang berjalan maupun yang baru akan diimplementasikan mengenai pengendalian, pengelolaan, pemantauan efektivitas serta efisiensi sistem dan prosedur untuk setiap unit Perusahaan.
4. Melakukan penilaian dan pemantauan mengenai sistem pengendalian informasi dan komunikasi.

5. Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian intern (termasuk pendamping/counterpart auditor eksternal, konsultan) yang ditugaskan oleh Direktur Utama.

4.3 Aktivitas Perusahaan

Untuk mencapai tujuan tersebut PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Provinsi Riau Pekanbaru mengeluarkan berbagai macam produk pinjaman yaitu:

- a. Pinjaman usaha rakyat mudah dan aman Pinjaman yang diberikan kepada masyarakat umum yang mempunyai usaha dan jaminan dengan tujuan modal usaha dan investasi
- b. Pinjaman serba guna yaitu pinjaman yang diberikan kepada PNS, Pegawai BUMD, dan Pegawai Swasta lainnya.
- c. Pinjaman Kita yaitu pinjaman yang diberikan kepada perorangan yang memiliki prospek usaha yang layak dan produktif.
- d. Pinjaman Pintar yaitu pinjaman yang diberikan khusus untuk membiayai pendidikan formal dan non formal untuk anda dan keluarga.
- e. Pinjaman Bakulan yaitu pinjaman yang diberikan kepada masyarakat secara berkelompok tanpa adanya jaminan/agunan.